
ANALISA KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM TEORI EKONOMI

Hilmiatus Sahla¹, Isnaini Harahap², Zuhrial M. Nawawi³

¹Universitas Asahan

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan

e-mail: hilmiatus.sahla03@gmail.com

Abstract: *This article reviews poverty and income distribution in economic theory. This article was prepared using the literature study method. The findings show that the policy strategy needed to overcome the problem of income distribution and poverty must pay attention to selective and effective institutional intervention policy aspects; fiscal policy that is sustainable, consistent and synergizes various programs; special policies for the very poor; and equitable development policies between cities and villages, especially in access to education, health and income distribution.*

Keywords: *Poverty, Income Distribution, Economy*

Abstrak: Artikel ini mengulas kemiskinan dan distribusi pendapatan dalam teori ekonomi. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur. Temuan hasil bahwa strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan yakni harus memperhatikan aspek kebijakan intervensi kelembagaan yang selektif dan efektif; kebijakan fiskal yang berkesinambungan, konsisten, dan bersinergi berbagai program; kebijakan khusus untuk masyarakat sangat miskin; dan kebijakan pembangunan yang merata antara kota dan desa khususnya dalam akses Pendidikan, kesehatan dan distribusi pendapatan.

Kata kunci: Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, Ekonomi

PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya dengan baik. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan. Tetapi permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Sehingga yang terjadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Mengatasi kemiskinan dan distribusi pendapatan merupakan inti dari permasalahan pembangunan. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup (income perkapita) dan kemakmuran dalam jangka Panjang. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi dalam pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan masalah besar di berbagai negara berkembang.

Dalam pemberantasan atau mengurangi kemiskinan merupakan hal yang menjadi

masalah dalam negara berkembang tidak terkecuali Indonesia, kemiskinan di Indonesia juga masih banyak dan butuh perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat sekitar terhadap sesama. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.

Masalah distribusi pendapatan telah dibahas juga oleh beberapa tokoh ekonom muslim, seperti Baqir Sadr dari mazhab Iqtishaduna. Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang kuat, dimana pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada sementara di pihak lain, pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut. sehingga masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Kemiskinan pada masyarakat Indonesia telah membatasi masyarakat dalam memperoleh haknya. Baik dalam ekonomi, sosial, kesehatan bahkan politik. Dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan pendapatan perkapita cenderung rendah, oleh karena itu kemiskinan menjadi persoalan pokok yang melekat sehingga dapat menghambat upaya pembangunan negara. Sebagai upaya menaikkan taraf perekonomian untuk menciptakan kesempatan kerja serta terwujudnya kehidupan dengan tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga angka kemiskinan harus ditekan. Salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan adalah ketimpangan distribusi

pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang cukup krusial baik dinegara maju maupun negara berkembang sehingga perlu untuk ditelaah. Ketimpangan telah lama memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan di negara-negara berkembang. Hal ini ada karena pembangunan ekonomi cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sehingga menimbulkan kenaikan tingkat ketimpangan yang terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa data data yang telah disediakan oleh institusi tertentu, artikel yang dipublikasi dalam jurnal hasil riset dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian, data diperoleh dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

Kata miskin sama dengan kata al-ba'sa', al-sa'il, al-'ailah, dan al-qani'. Kata al-ba'sa' adalah merupakan ism jamak yang mufradnya adalah al-bu's. Kata al-bu's adalah bentuk ism masdar berasal dari huruf ba', hamzah dan sin yang berarti kesulitan, sedangkan al-bu's berarti kesulitan dalam kehidupan. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata al-bu's, al-ba'is dan al-ba'sa' semua berarti kesulitan dan sesuatu yang dibenci; namun kata al-bu's lebih banyak digunakan dalam kefakiran dan peperangan dan al-ba'sa' lebih banyak digunakan dalam kekalahan. Jadi, al-ba'sa' berarti kemiskinan karena peperangan atau kekalahan dan kesulitan. Kata al-sa'il adalah bentuk isim fa'il berasal dari huruf sin, hamzah dan lam berarti mencari, meminta, menghendaki dan mengemis. Menurut Al Raghib al-

Ashfahani sa'ala berarti menginginkan pengetahuan tentang harta atau sesuatu yang menghasilkan harta. Dengan demikian, al-sa'il adalah orang yang menghendaki atau menginginkan suatu pengetahuan dan meminta yang berupa materi, bisa berwujud uang atau harta benda yang lain. Dengan kata lain orang yang meminta sesuatu dalam wujud immateri atau materi.

Kata al-dha'if merupakan isim shifah musyabbahah yang berasal dari huruf dhad, 'ain, dan fa' berarti lawan dari kuat, atau dengan kata lain berarti lemah. Kelemahan ini bisa pada jiwa, badan dan keadaan. Dengan demikian al-dha'if berarti orang yang lemah yang muncul disebabkan oleh jiwanya, badannya (fisik) dan keadaan atau situasi yang berhubungan dengannya. Kata al-'ailah adalah bentuk isim mashdar berasal dari huruf 'ain, ya', dan lam berarti mengalami kemiskinan dan membutuhkan, karena orang yang miskin membutuhkan bantuan di luar dirinya, maka Al-Raghib al-Ashfahani mengartikan 'ailah dengan mengalami kefakiran atau kemiskinan.

Kata al-qani' adalah isim fa'il berasal dari huruf qaf, nun, dan 'ain mempunyai dua arti dasar, pertama menuju pada sesuatu, dan kedua perputaran dalam sesuatu sesuatu, sedang kata qana'a dapat berarti sa'ala atau meminta. Sehingga al-qani' dapat berarti orang yang meminta. Menurut Al-Raghib al-Ashfahani al-qani' adalah peminta yang tidak mendesak dan merasa ridha

dengan apa yang diperolehnya. Al-qdni' adalah orang yang tidak mampu, namun ia mencukupkan apa yang diperolehnya tanpa suka meminta-minta.

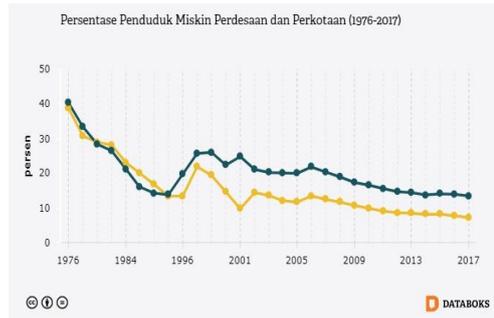
Kemiskinan merupakan kondisi dimana Masyarakat dihadapkan pada kerugian baik aktual maupun potensial. Kerugian yang dimaksud berupa tuna wisma, pengangguran, dan bencana kesehatan serta rendahnya pendapatan. Dalam kasus lain, kekerasan, penghinaan, dan pendidikan yang buruk turut berkontribusi. Di banyak negara berkembang kemiskinan itu multidimensi, Kemiskinan terdiri dari banyak dimensi

yang saling terkait. 1) meskipun kemiskinan jarang sekali disebabkan oleh kekurangan satu hal, namun intinya adalah kekurangan makanan. 2) kemiskinan memiliki dimensi psikologis yang penting seperti ketidakberdayaan, ketidakbersuaan, ketergantungan, rasa malu, dan penghinaan, 3) masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar jalan, transportasi, dan air bersih. 4) masyarakat miskin menyadari bahwa pendidikan menawarkan jalan keluar dari kemiskinan, 5) kesehatan yang buruk dan penyakit ditakuti hampir di semua tempat sebagai sumber kemiskinan. 6) masyarakat miskin jarang berbicara mengenai pendapatan, namun fokus pada pengelolaan asset, sosial, dan lingkungan sebagai cara untuk mengatasi kerentanan mereka. Di banyak daerah, kerentanan ini mempunyai dimensi gender. (Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., and Ballon, 2015)

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani.

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal

dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnnya penduduk miskin.



Gambar 1 Persentasi Penduduk Miskin Wilayah Perdesaan dan Perkotaan

Jika melihat dari grafik persentase tersebut bahwa fluktuasi kenaikan dan penurunnya disebabkan banyak faktor. Jenis kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pola waktunya yaitu: (1) persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi; (2) cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) accidental poverty, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya. Ukuran kemiskinan absolut dengan menggunakan garis kemiskinan atau kondisi kondisi tertentu yang mencerminkan situasi kemiskinan. Sedangkan ukuran kemiskinan relatif dengan membandingkan dengan jumlah keseluruhan kelompok dan dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz dan

menggunakan Gini Ratio untuk mengetahui besarnya kesenjangan.

Pengentasan kemiskinan (no poverty) dan Pengurangan ketimpangan (reducing inequality) tetap menjadi prioritas dalam program SDGs. (Barika et al., 2024) Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan Masyarakat miskin.

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala (1981) meliputi: (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya; (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; (2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan (3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau

berhemat.

Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu: (1) perencanaan sebagai reformasi sosial (social reform), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat; (2) perencanaan sebagai analisis kebijakan (policy analysis), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat; (3) perencanaan sebagai pembelajaran sosial (social learning), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (learning by doing), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli; dan (4) perencanaan sebagai mobilisasi sosial (social mobilization), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut. pembangunan dapat dilihat sebagai suatu proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati masyarakat. Berfokus pada kebebasan manusia kontras dengan pandangan yang lebih sempit mengenai pembangunan, seperti mengidentifikasi pembangunan dengan pertumbuhan produk nasional bruto, atau dengan peningkatan pendapatan pribadi, atau

dengan industrialisasi, atau dengan kemajuan teknologi atau dengan modernisasi sosial.(A, 1999)

Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam empat model pembangunan. Model pembangunan I menitikberatkan pada pertumbuhan pendapatan nasional. Model pembangunan II menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok/dasar. Model pembangunan III berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan. Sedangkan model pembangunan IV menitikberatkan pada peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah. Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran; peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima sasaran program; dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat.

Distribusi Pendapatan

Perubahan pertumbuhan dan kesenjangan pendapatan suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan kemiskinan. Interaksi ketiganya dianggap sebagai hambatan yang signifikan dalam mengembangkan rencana pembangunan. Dalam rangka mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan, model Segitiga Kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan (PGI) mempertimbangkan interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan secara keseluruhan. Menurut paradigma ini, mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, bukan

hanya berkonsentrasi pada satu isu saja. Perubahan Kemiskinan \equiv F(pertumbuhan, distribusi, perubahan distribusi). (Ihsani & Rohman, 2022)

Distribusi Pendapatan merupakan salah satu jenis ketidakmerataan dari aspek aset. Terdapat pula jenis ketidakmerataan yang dapat dilihat dari aspek lain seperti kekuasaan, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, dan sejenisnya. Distribusi pendapatan dibagi menjadi tiga jenis yaitu distribusi pendapatan perorangan, distribusi pendapatan sektoral, dan distribusi pendapatan regional. (Monica, 2022)

Distribusi Pendapatan Perorangan merupakan indikator sederhana dan paling umum yang menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan yang mereka miliki. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tidak diperhatikan seperti cara mendapatkan sumber pendapatan, lokasional sumber pendapatan, dan okupasional sumber pendapatan. Data terkait distribusi pendapatan perorangan secara umum dapat disajikan

Distribusi pendapatan fungsional disebut juga sebagai distribusi pangsa pendapatan atau faktor produksi (factor share distribution). Distribusi pendapatan ini menjelaskan pangsa yang diterima oleh setiap faktor produksi yang antara lain meliputi tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Persentase penghasilan tenaga kerja (upah) secara keseluruhan akan dibandingkan dengan persentase pendapatan total yang berwujud sewa, bunga, dan laba. Distribusi pendapatan fungsional dinilai memiliki relevansi yang kurang tajam karena tidak memperhitungkan pengaruh dari kekuatan-kekuatan non-pasar, seperti kekuatan politik, dalam menentukan tingkat harga dari masing-masing faktor produksi.

Distribusi pendapatan regional adalah jenis distribusi pendapatan yang ditinjau berdasarkan cakupan daerah seperti antar kota/kabupaten, antar provinsi, antar pulau, atau antar desa-kota. Distribusi pendapatan ini dapat menunjukkan

adanya perbedaan tingkat kesejahteraan dari masing-masing wilayah atau daerah. Penyebab adanya perbedaan distribusi pendapatan ini antara lain adalah kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan regional yaitu adalah masalah utama yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan regional yang tidak merata. Masalah utama tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Sejak tahun 1970an, ketimpangan pendapatan telah meningkat secara signifikan di negara-negara kaya, khususnya Amerika Serikat, dimana konsentrasi pendapatan pada dekade pertama abad ke-21 kembali, bahkan sedikit melebihi tingkat yang dicapai pada dekade kedua abad ke-21 abad sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan jelas mengapa dan bagaimana kesenjangan menurun untuk sementara waktu. Tentu saja, pertumbuhan yang sangat pesat di negara-negara miskin dan berkembang, khususnya Tiongkok, mungkin terbukti menjadi kekuatan yang ampuh untuk mengurangi kesenjangan di tingkat global, seperti yang terjadi di negara-negara kaya selama periode 1945–1975. Namun proses ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di negara-negara berkembang dan bahkan lebih mendalam lagi di negara-negara kaya. (Piketty, 2022)

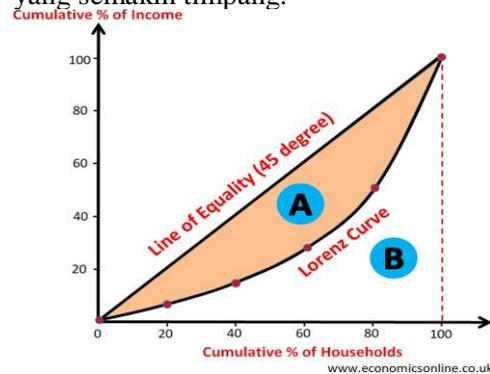
Selain itu, ketidakseimbangan yang mengesankan yang diamati dalam beberapa dekade terakhir di bidang keuangan, minyak, dan pasar real estat tentu saja menimbulkan keraguan mengenai keniscayaan “jalur pertumbuhan seimbang” yang dijelaskan oleh Solow dan Kuznets, yang menyatakan bahwa semua variabel ekonomi utama seharusnya bergerak dengan kecepatan yang sama. Akankah dunia pada tahun 2050 atau 2100 dimiliki oleh para pedagang, manajer puncak, dan orang-orang super kaya, atau akankah dunia menjadi milik negara-negara

penghasil minyak atau Bank of China? Atau mungkin perusahaan tersebut akan dimiliki oleh negara-negara bebas pajak (tax havens) yang menjadi tempat perlindungan para pelaku pajak. (Ravallion, 1997)

Di satu sisi, pada awal abad kesembilan belas, terjadi perubahan-perubahan yang mengesankan dalam perekonomian di seluruh dunia, dan sangat sulit untuk mengetahui seberapa luas perubahan tersebut. apa yang akan terjadi atau seperti apa distribusi kekayaan global, baik di dalam maupun antar negara, dalam beberapa dekade mendatang. Para ekonom abad ke-19 menempatkan persoalan distribusi sebagai inti analisis ekonomi dan berupaya mempelajari tren jangka panjang. Sudah lama berlalu ketika seharusnya menempatkan kembali permasalahan kesenjangan sebagai pusat analisis ekonomi dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertama kali muncul pada abad kesembilan belas. Sudah terlalu lama para ekonom mengabaikan distribusi kekayaan, sebagian karena kesimpulan Kuznets yang optimis dan sebagian lagi karena antusiasme yang berlebihan dari para ekonom terhadap model matematika sederhana yang didasarkan pada apa yang disebut dengan ekonomi.

Indeks atau Rasio Gini adalah satu peralatan analisis yang dipergunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada satu daerah tertentu. Gini ratio merupakan suatu koefisien yang, berkisar dari angka 0-1, menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefisien nya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Sebaliknya koefisien yang kian besar (semakin mendekati 1) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang. Angka rasio gini dapat ditaksirkan secara visual langsung dari Kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara Kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBE. Semakin melengkung kurva Lorenz akan semakin

luas area yang dibagi, rasio gini akan kian besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin timpang.



Gambar 2 Kurva Lorenz

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang samadengan yang lainnya.

Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Bila $GR = <0.4$ artinya ketimpangan pendapatan berada dalam kategori yang rendah,

Bila $GR = 0,4-0,5$ artinya ketimpangan pendapatan berada dalam kategori sedang,

Bila $GR = .0,5$ artinya ketimpangan pendapatan berada dalam kategori yang tinggi.

Masalah Distribusi diuraikan dalam Al-quran dan hadist sebagai upaya membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi yang seimbang antara lain 1) pendistribusian sumber-sumber kekayaan yang penting misalnya zakat, ghanimah dan harta fa'i, nafkah kepada keluarga serta kerabat, 2) Menegaskan hukum hukum distribusi yaitu ada yang wajib atau sukarela, 3) Melarang penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang tertentu saja, 4) Memberikan balasan terbaik bagi orang yang banyak berdistribusi di dunia (kesejahteraan) dan akhirat (surga).

Anas Zarqa menjelaskan bahwa distribusi

adalah suatu tranfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara lain, seperti warisan, sedekah, wakaf dan zakat. Zarqa menjelaskan beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi islam yaitu 1) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, 2) Menimbulkan efek positif bagi pemberi, 3) Menciptakan kebaikan diantara semua orang, antara kaya dan miskin, 4) Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, 5) Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan 6) Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. (Harahap, 2023)

SIMPULAN

Faktor-faktor yang terkait dengan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia antara lain adalah keterbukaan ekonomi, investasi, faktor wilayah, pendidikan, aset kekayaan, dan sektor pekerjaan. Strategi kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia hendaknya memperhatikan aspek sebagai berikut yaitu: 1) kebijakan intervensi kelembagaan yang selektif dan efektif; 2) kebijakan fiskal yang berkesinambungan, konsisten, dan bersinergi berbagai program; 3) kebijakan khusus untuk masyarakat sangat miskin; dan 4) kebijakan pembangunan yang merata antara kota dan desa khususnya dalam akses pendidikan dan kesehatan dan distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

A, S. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
 Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., and Ballon, P. (2015). (2015). Chambers, RT. In

Multidimensional Poverty Measurement and Analysis (Vol. 15, Issue 1). Oxford: Oxford University Press, ch. 1. <https://doi.org/10.1093/acprof>

Barika, B., Ekaputri, R. A., & Hermanto, B. A. (2024). Determinan Kemiskinan Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 13(1), 68. <https://doi.org/10.35448/jequ.v13i1.20532>

Harahap, I. (2023). *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. Perdana Publishing.

Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i1.16292>

Monica, A. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Pada Kecamatan Tanete Riattang. *Al- Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 1–10.

Piketty, T. (2022). A Global Tax on Capital. In *Capital in the Twenty-First Century*. The Belknap Press Of Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjnrvx9.20>

Ravallion, M. (1997). Good and Bad Growth: The Human Development Reports. *World Development*, 25(5), 631–638. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(96\)00141-6](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(96)00141-6)

Amizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, hal. 17.

djpb. kemenkeu. memahami kembali strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia sebagai sumber penerimaan Negara. <https://databoks.katadata.co.id/search/cse?search=kemiskinan+di+indonesia>